



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI V DPR RI**

**(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN SAR NASIONAL, DAN BPWS)**

Tahun Sidang	: 2018 – 2019
Masa Sidang	: III
Rapat	: Ke -
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Hari/Tanggal	: Selasa, 29 Januari 2019
Sifat	: Terbuka
Pukul	: 10.30 WIB s.d 13.25 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V), Gedung Nusantara DPR RI
Acara	: 1. Membahas tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2018 Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. 2. Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2018 Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi.
Ketua Rapat	: Ir. Fary Djemy Francis, MMA
Sekretaris	: Dra. Prima MB. Nuwa, M.Si
Hadir Anggota	: dari 52 orang Anggota Komisi V DPR RI
Hadir Mitra	: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Perhubungan, dan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi beserta jajaran terkait lainnya.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat dibuka pada pukul 10.30 WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Perhubungan, dan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi pada hari ini adalah membahas tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2018 dan Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2018 masing-masing Kementerian.
3. Ketua Rapat mempersilakan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Perhubungan, dan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya.
4. Ketua Rapat mempersilakan kepada Anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan pertanyaan dan tanggapan.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT:

1. Komisi V DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang memperoleh Opini "Wajar Tanpa Pengecualian" terhadap Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan tahun 2017.
2. Komisi V DPR RI meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi Hasil Pemeriksaan Semester I tahun 2018 BPK RI yang belum tuntas sebelum pemeriksaan berikutnya dilaksanakan.
3. Komisi V DPR RI memahami serapan anggaran dalam APBN TA 2018 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebagai berikut:

No	Lembaga	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
1.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan	89,60%	91,60%
2.	Kementerian Perhubungan	84,52%	90,54%
3.	Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	93,04%	95,70%

Selanjutnya, Komisi V DPR RI meminta kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk meningkatkan capaian kinerja dalam APBN yang akan datang sesuai dengan saran dan masukan Komisi V DPR RI.

Khusus terhadap capaian pembangunan perumahan pada Program Pembangunan Rumah Susun Rumah Swadaya dan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh yang masih jauh dari target sasaran 2015-2019, Komisi V DPR RI mendesak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk segera melakukan kajian komprehensif mendalam dan inovasi kebijakan sebagai upaya mengatasi kendala serta percepatan pencapaian target.

4. Komisi V DPR RI akan mengagendakan Rapat Dengar Pendapat dengan para Pejabat Eselon I Kementerian terkait untuk melakukan pendalaman terhadap temuan BPK pada Hasil Pemeriksaan Semester I 2018.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.25 WIB.

Jakarta, 29 Januari 2019

KETUA RAPAT,

FARY DJEMY FRANCIS

**MENTERI DESA, PDT, DAN
TRANSMIGRASI**

EKO PUTRO SANDJOJO

MENTERI PERHUBUNGAN,

BUDI KARYA SUMADI

**MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,**

M. BASOEKI HADIMOELJONO